



Research Article

Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam

Robiatul Andawiyah¹, Hamdani², Maimun³

1. Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

E-mail: robiatulandawiyah.2001@gmail.com



2. Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

E-mail: daniebarbelo@gmail.com

3. Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

E-mail: maimun2@iainmadura.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2024

Revised : March 27, 2025

Accepted : April 12, 2025

Available online : May 6, 2025

How to Cite: Robiatul Andawiyah, Hamdani and Maimun (2025) "Financing Management in Improving the Quality of Islamic Educational Institutions", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 1086–1096. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1436.

Financing Management in Improving the Quality of Islamic Educational Institutions

Abstract. Every Islamic educational institution has the same target to achieve national education standards (SNP). The quality of education is important and is taken into account because of institutional demands so that these achievements can be recognized at the national level. One effort that can be made by education providers is to manage and utilize the finances obtained by Islamic education institutions so that they can be allocated to the needs of improving the quality of the institution. The aim of this research is to examine the financing management part in order to improve

the quality of Islamic education institutions. This research can be useful as a reference for Islamic educational institutions in reviewing income, expenditure and allocation to fulfill education quality standards through management methods.

This research uses a qualitative analysis approach. By using the library research method. Literature study is a series of activities related to collecting data and libraries, reading, recording and processing research materials. The primary data source in this research is studies on financial management in improving quality, while the secondary data source in this research is related literature from books, journals, articles and other relevant sources. Then data analysis in this research uses data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that financial management can improve the quality of education, namely through the concept of planning for the needs of Islamic educational institutions, organizing through bookkeeping of income and expenses. The concept of mobilization in efforts to finance education that supports the need for quality improvement and the concept of supervision as a form of control over the use of financial education institutions that are used in the context of improving the quality of Islamic educational institutions.

Keywords: Management, Financing, Quality, Education, Islam.

Abstrak. Setiap lembaga pendidikan Islam mempunyai target yang sama untuk mencapai standar nasional pendidikan (SNP). Mutu pendidikan merupakan hal yang penting dan diperhatikan karena tuntutan kelembagaan yang nantinya capaian tersebut dapat diakui ditingkat nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yaitu dengan mengelola dan memanfaatkan keuangan yang diperoleh lembaga pendidikan Islam agar dapat dialokasikan pada kebutuhan perbaikan mutu lembaga. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana manajemen pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu lembaga Pendidikan Islam. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi lembaga pendidikan Islam dalam meninjau pemasukan, pengeluaran serta pengalokasian pada pemenuhan standart mutu pendidikan melalui cara-cara manajemen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Studi Pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data dan pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kajian-kajian mengenai manajemen keuangan dalam meningkatkan mutu, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu literature terkait baik dari buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber lain yang relevan. Kemudian analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan dapat meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan melalui konsep perencanaan pada kebutuhan lembaga pendidikan Islam, pengorganisaian dengan melalui pembukuan pendapatan dan pengeluaran. Konsep penggerakan dalam upaya pembiayaan pendidikan yang menunjang pada kebutuhan perbaikan mutu dan konsep pengawasan sebagai bentuk mengontrol terhadap penggunaan keuangan lembaga pendidikan kearah perbaikan mutu kelembagaan.

Kata Kunci : Manajemen, Pembiayaan, Mutu, Pendidikan, Islam.

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu masih menjadi kajian trend dikalangan peneliti dan pengembang pengetahuan, banyak sekali strategi dan metode yang digunakan dalam mengupayakan capaian mutu tersebut ditengah-tengah lembaga pendidikan Islam.

Secara mendasar, peningkatan mutu yang dikaji mengarah pada pemanfaatan sarana prasarana ataupun pemanfaatan pada sumber daya manusianya, dengan anggapan bahwa keduanya merupakan bagian penting dalam proses peningkatan mutu, sehingga peningkatan terbatas pada keduanya. Padahal dalam menciptakan sarana pendidikan ataupun sumber daya manusia yang baik tidak lepas dari dorongan pembiayaan yang memadai. Karena pada prosesnya, pendidikan tidak akan belajalan seperti saat ini tanpa adanya dukungan biaya, biaya merupakan salah satu faktor keberlangsungan sebuah pendidikan, karena kegiatan apapun yang diselenggarakan didalam pendidikan tidak lepas dari adanya dorongan pembiayaan. Seperti yang sudah diketahui bahwa biaya pendidikan yaitu pengumpulan dan penganggaran dana dalam membiayai operasional dan pengembangan sektor Pendidikan (Putri, 2019). Dari dana yang diperoleh lalu kemudian dialokasikan terhadap semua sektor pendidikan yang bisa disebut dengan distribusi pembiayaan. Distribusi pembiayaan sendiri dapat dipahami sebagai langkah dalam memenuhi segala aspek kebutuhan dalam pendidikan, seperti biaya gaji guru, biaya transportasi, pengadaan sarana prasarana, pengadaan peralatan, pengadaan supervisi dan distribusi pendidikan lain-lain. Ini merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan guru sebagai penentu terhadap kualitas pendidikan disekolah (Mustari, 2014). Maka penting sekali agar kepala sekolah dan aparatur bawahannya dapat lebih memerhatikan pada aspek pengelolaan anggaran pendidikan serta pengalokasian dana berdasarkan kebutuhan standart nasional Pendidikan.

Standar nasional pendidikan merupakan standart yang diakui sebagai target lembaga bermutu, untuk sampai pada standart tersebut maka lembaga pendidikan Islam harus diperhatikan, diantaranya input, proses serta output (Fitrah, 2017). Ketiganya merupakan cakupan penilaian mutu dan standarisasi lembaga bermutu. Artinya, lembaga pendidikan Islam akan dikatakan sebagai lembaga yang bermutu apabila sudah memenuhi tahapan input, proses dan output itu sendiri. Untuk sampai pada standart yang telah ditentukan harus diupayakan dengan mengelola sumber pendapatan lembaga pendidikan dan mendistribusikan pada perbaikan ataupun pengadaan-pengadaan ditengah-tengah lembaga pendidikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Solehan yang berjudul “manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam” mengungkapkan bahwasanya manajemen yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan cara mengoptimalkan sumber yang diperoleh, kemudian mengalokasikan pada sarana prasarana pendukung yang dapat memberikan keefektifan pada proses pembelajaran dengan tujuan belajar mengajar yang dilakukan bisa aktif, efektif serta dapat menyenangkan (Solehan, 2022). Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mesiono dkk, dalam tulisannya “Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai” bahwa manajemen pembiayaan yang diberikan terhadap yayasan digunakan dengan dengan sebaik-baiknya, upaya peningkatan mutu yang diupayakan yaitu melalui kordinasi dengan teman sejawat setiap kegiatan (Mesiono dkk., 2021). Penelitian berikutnya dilakukan oleh Anis Nur Nur Sobah dalam tulisannya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan Islam” memaparkan bahwa dari hasil penelitiannya yaitu manajemen pembiayaan mengarah pada bagaimana

pembukuan, penganggaran, penatausahaan serta penilaian pada pembiayaan (Nursobah, 2022). Berbeda dengan hasil temuan pada tulisan Jamiluddin Usman yang berjudul “Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah” dimana dalam hasil tulisannya disampaikan bahwa tiga hal yang harus diupayakan dalam peningkatan mutu diantaranya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi atau pertanggungjawaban (Usman, 2016).

Berbeda dengan penelitian ini yang spesifik akan mengkaji Manajemen pembiayaan lembaga pendidikan Islam yang penyajiannya mengarah pada bagaimana biaya yang diperoleh dapat menghasilkan mutu. Mutu yang dimaksud yaitu secara menyeluruh dari awal dana pendidikan didapatkan sampai pada bagaimana pengalokasiannya sehingga menyentuh terhadap standart mutu kelembagaan. Penelitian ini bersifat konseptual serta menyajikan tawaran-tawaran bagaimana lembaga mengarahkan biaya yang diperoleh, sehingga dapat menjadi acuan terhadap lembaga pendidikan Islam agar mencapai pada target mutu pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah, supaya lembaga pendidikan dapat mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya dan tertuju pada pemenuhan standarisasi lembaga bermutu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penyajian konsep pembiayaan dalam penelitian ini meliputi sumber pembiayaan pendidikan, kontribusi pembiayaan lembaga pendidikan dan manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Proses penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Metode kepustakaan adalah proses yang berkaitan dengan pengumpulan data yang menitik beratkan pada pustaka yang dapat berupa membaca, mencatat serta mengolah bahan yang diadopsi berdasarkan kesesuaian dengan yang dikaji pada penelitian ini (Zed, 2023). Adapun dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dimaksud yaitu meliputi kajian mengenai pembiayaan pendidikan, sedangkan data sekunder mengarah pada kajian pendukung yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan literature lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya pada proses analisis yaitu melalui tiga cara, diantaranya: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dimana peneliti akan memilih kajian-kajian yang relevan dan mendukung pada penyelesaian penelitian serta akan dilanjutkan dengan tahap analisis dan sekaligus akan menarik kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh. Data-data yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan sehingga dalam penyelesaiannya dapat benar-benar dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam

Pembiayaan pendidikan adalah proses yang berkaitan dengan (dari mana biaya itu didapatkan dan untuk apa biaya itu digunakan) dalam lembaga pendidikan (Roji, 2020). Menurut mengungkap bahwasanya yang dimaksud dengan biaya pendidikan yaitu berupa nilai ataupun uang yang didapat dalam rangka proses penyelenggaraan sebuah pendidikan, sehingga dalam prosesnya lembaga harus

mengawali dengan analisis kebutuhan pada setiap sumber daya pendidikan baik dari kualifikasi ataupun spesifikasi serta jumlahnya dalam rangka menjalankan sebuah pendidikan (Mesiono & Roslaeni, 2021). Gagasan yang sama dari Munir yang menggagas bahwa yang dimaksud dengan biaya pendidikan yaitu sejumlah nilai uang ataupun nilai yang diperuntukkan pada proses berlangsungnya pendidikan yang dibelanjakan untuk kebutuhan siswa (Munir, 2013). Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa pembiayaan pendidikan adalah suatu aktivitas pengelolaan perekonomian pendidikan sebagai langkah berjalannya lembaga pendidikan. Keberadaan anggaran pendidikan yang memadai dapat dialokasikan untuk menopang kebutuhan kegiatan-kegiatan berdasarkan target yang ditetapkan lembaga (Karimah, 2022). Anggaran yang diperoleh disebut dengan sumber pembiayaan pendidikan. Sumber pembiayaan adalah serangkaian biaya yang diperoleh lembaga dalam menjangkau kebutuhan pendidikan. Ulfa Dj. Nurkamiden dan Herson Anwar menjelaskan bahwa sumber pembiayaan bisa diperoleh dari 4 sumber, yaitu: 1) biaya dari pemerintah, 2) biaya dari orang tua wali, 3) biaya dari masyarakat dan 4) biaya lembaga sendiri (Nurkamiden & Anwar, 2023). Artinya, biaya pendidikan tidak hanya diperoleh dari bantuan-bantuan dari pemerintah, lembaga juga dapat memperoleh dana pendidikan melalui sumbangan-sumbangan masyarakat ataupun dari sumbangan orang tua wali ataupun dari sumber lain yang sah.

Dalam yuridis formal, pemerintah dalam pembiayaan pendidikan hanya mengalokasikan dananya sebesar 20% dari APBN, dalam hal ini pemerintah menuntut terhadap masyarakat untuk berkontribusi membantu keuangan pendidikan supaya dapat menutup kekurangan alokasi 20% tersebut (Zulfa, 2012). Kontribusi masyarakat dan orang tua wali dapat berupa membayar biaya pendidikan anaknya melalui pembayaran secara resmi, membayar kontribusi melalui komite lembaga, membayar gaji guru diluar jam pelajaran (guru ekstrakurikuler) dan lain-lainnya. Kontribusi dari Biaya-biaya tersebut lalu kemudian juga dapat diadopsi dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan yang dapat berupa pengadaan ataupun perbaikan pada apa yang telah ada. Secara mendasar, tujuan biaya tersebut diperoleh dalam rangka berlangsungnya sebuah pendidikan bukan untuk kepentingan perorangan ataupun kepentingan kepala sekolah semata melainkan pada kebutuhan pendidikan. Maka dalam lembaga pembukuan, pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh komite lembaga yang disetujui oleh kepala sekolah ataupun instansi diatasnya. Demikian harus dilakukan supaya anggaran pembiayaan pendidikan dapat efisien, akuntabel dan transparan.

Sumber pembiayaan merupakan bentuk dari simpati dan keberlangsungan suatu pendidikan, biaya-biaya yang diperoleh oleh lembaga pendidikan dapat terbentuk melalui 2 cara, yaitu pembiayaan secara langsung dan tidak langsung. Pembiayaan secara langsung adalah sumbangan ataupun bantuan yang didapat dari pemerintah ataupun masyarakat yang berupa barang, sarana prasarana ataupun hal lain yang menunjang terhadap terlaksananya pendidikan, sedangkan biaya tidak langsung yang dimaksud yaitu biaya yang berupa uang yang dapat diadopsi untuk kebutuhan seperti gaji guru, pengadaan sarana, biaya transportasi, biaya lauk pauk ataupun lain-lain.

Distribusi Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam

Distribusi pembiayaan pendidikan merupakan proses sasaran pembelanjaan pendidikan. Pengertian distribusi secara umum yaitu penyaluran barang hasil produksi dari pihak produsen ke tangan konsumen (Rachman & Yuningsih, 2020). Dalam konteks pembiayaan pendidikan, distribusi dimaksudkan sebagai penyaluran keuangan/pendapatan lembaga pada kebutuhan ataupun program lembaga pendidikan. Dengan kata lain, distribusi yaitu penyaluran anggaran pendapatan lembaga terhadap segala aspek kebutuhan yang ada didalam lembaga dengan memerhatikan manfaat dan kegunaanya pada lembaga pendidikan, baik itu mengarah pada proses terlaksananya pembelajaran, admintrasi sekolah, humas, lingkungan dan lain-lain.

Kegiatan pembiayaan pendidikan mempunyai 5 prinsip yang harus dijalankan ditengah-tengah lembaga pendidikan. Diantaranya 1) hemat, efesien serta harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, 2) biaya harus diarahkan pada ketetapan rencana ataupun program yang telah ditentukan oleh penyelenggara pendidikan, 3) keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan, 4) penganggaran pendidikan harus transparan dan harus mengandung keterbukaan pada publik, dan 5) harus terdapat penguatan atas partisipasi masyarakat ataupun publik(Wahyudin, 2021). Prinsip tersebut sebagai bukti bahwa pembiayaan pendidikan dijalankan berdasarkan manfaat dan efesiensinya bagi lembaga pendidikan. Penggunaan biaya pendidikan merupakan peran dari tanggung jawab komite sekolah dan kepala sekolah. Pembukuan, pemasukan dan pengeluaran anggaran pendidikan harus dapat disetujui oleh kepala sekolah melalui tangan komite sekolah.

Dalam terminologi administrasi keuangan, khususnya adminsitrase keuangan bidang pendidikan, dibedakan antara biaya (cost) dan pembelanjaan (expenditure) (Munir, 2013). Biaya (cost) sendiri adalah nilai uang yang dikeluarkan sekolah dalam menjalankan kegiatan tertentu, seperti halnya kegiatan akademik sekolah dan kegiatan siswa. Berbeda dengan pembelanjaan (expenditure) yang dimaksudkan sebagai keungan yang dikelaurkan sekolah untuk mebiayai kegiatan lembaga yang sifatnya rill dalam rangka membiayai unit tertentu (Nasution dkk., 2022). Keduanya merupakan pembiayaan yang berbeda yang dikeluarkan lembaga untuk kegiatan tertentu pula.

Penyelenggra pendidikan dituntut untuk mempunyai komitmen dalam rangka menjalankan lembaga pendidikan dengan sebaik mungkin. Demikian dapat dupayakan dengan adanya kerja sama ataupun kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru, atupun antara guru dengan siswa. Hal ini sebagai bukti terhadap ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah, bahwa sistem pendidikan nasional yaitu meliputi visi misi yang baik dan berkualitas terhadap lembaga dimasa yang akan datang, menjalankan tujuan-tujuan pendidikan, merencanakan pendidikan nasional yang baik yang kompetitif serta membawa pada nama baik lembaga ditingkat nasional bahkan ditingkatan internasional.

Manajemen Pembiayaan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam

1. Mutu Lembaga Pendidikan Islam

Setiap lembaga pendidikan Islam yang menduduki di negara Indonesia mempunyai ukuran target yang sama agar sesuai dengan kualitas lembaga pendidikan dibawah naungan negara (permendikbud), karena realitas dilapangan, lembaga yang ada dibawah naungan negara selangkah lebih manju dari pada lembaga yang ada dibawah kemenag, maka dari itu lembaga pendidikan Islam harus mencapai pada standart nasional pendidikan (SNP) supaya dapat mengimbangi terhadap lembaga yang ada dibawah negara (permendikbud). Apabila lembaga pendidikan Islam sudah mencapai pada standart tersebut akan dikatakan sebagai lembaga bermutu. Mutu sendiri mempunyai arti kualitas, derajat atau tingkat (Kuntoro, 2019). Menurut Riswel Asrita, mutu mempunyai makna ukuran, kadar, ketentuan dan penilaian tentang kualitas sesuatu barang maupun jasa (produk) yang mempunyai sifat absolut dan relative (Asrita dkk., 2022). Sifat absolut yang dimaksud bahwa mutu dapat diartikan sebagai tingkat paling tinggi, atau dapat dikatakan sebagai standart unggul, tinggi, baik, baik sekali, cantik, bagus, mewah dan sebagainya. Sedangkan dalam arti relatif masih dibagi menjadi dua yaitu: 1) menyesuaikan dengan spesifikasi dan 2) memenuhi kebutuhan pelanggan (Basyit, 2018). Hal ini karena mutu adalah tentang pelayanan terhadap para pelanggan sehingga mendapat kepuasan terhadap pelayanan dalam sebuah institusi. Dalam ranah lembaga pendidikan Islam, mutu dikatakan sebagai kualitas kelembagaan dalam memberikan pelayanan terhadap 2 pelanggan, yaitu siswa dan masyarakat. Keduanya merupakan pelanggan pendidikan yang dapat menilai terhadap kualitas sebuah lembaga yang hal tersebut dinilai dari bagaimana pelayanan dari lembaga itu sendiri. Pelayanan bagi siswa yang dimaksud seperti pelayanan terhadap kenyamanan saat proses pembelajaran, lingkungan yang nyaman, administrasi yang mudah, bisa berupa bimbingan dan didikan ataupun dan lain-lain yang berkaitan dengan kesiswaan. Berbeda dengan pelayanan terhadap masyarakat, ini dapat diupayakan dengan melalui humas (hubungan masyarakat) dari pihak lembaga, seperti halnya melalui kominfo terhadap prestasi kelembagaan, prestasi siswa, keunggulan lembaga, fasilitas lembaga dan pelayanan khusus pada pelayanan orang tua wali saat melakukan administrasi dilembaga pendidikan.

Mutu dalam pandangan standar dunia Pendidikan khususnya di Indonesia, merupakan pencapaian tujuan dari ketetapan delapan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau sebuah kualitas yang dapat dihasilkan sebuah lembaga Pendidikan tersebut (Ramdani, 2023). Apabila pendidikan tidak memenuhi 8 standart nasional, maka pendidikan tersebut juga bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang tidak bermutu. Ke 8 standar mutu yang dimaksud sebagaimana dalam pasal 2 ayat PP No. 19 tahun 2005 yang menyebutkan standart mutu diantaranya: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan sekolah, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Setiap standart yang ditentukan oleh pemerintah harus upayakan lembaga pendidikan Islam

guna mencapai target standart yang menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga yang berkualitas.

2. Manajemen Pembiayaan dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Islam

Manajemen dan anggaran mempunyai hubungan yang erat dalam aktivitas pembiayaan, hubungan antara keduanya adalah untuk membantu manajemen dalam mengelola perusahaan(Syaifullah, 2021). Dalam ranah pendidikan Islam, posisi manajemen sebagai fungsi merencanakan, menentukan, memutuskan segala bentuk proses pembiyaan lembaga, oleh karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mengelola anggaran yaitu sebagai langkah awal berjalannya pembiayaan lembaga pendidikan Islam.

Kepala sekolah sebagai seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi mempunyai peran dan tanggung jawab dalam proses pendidikan yang dipimpin. Proses pendidikan yaitu sebuah proses dimana ada perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan yang mampu mempengaruhi pada proses dapat dikatakan sebagai input, dan apabila proses tersebut membuahi hasil maka disebut output(Supadi, 2021). Input merupakan sesuatu yang ada dalam lembaga itu sendiri, seperti guru bermutu, pembelajaran bermutu, kurikulum bermutu ataupun fasilitas yang bermutu. Proses sendiri merupakan semua aktivitas lembaga pendidikan itu sendiri, seperti pada aspek pembelajarannya, adminitrasinya ataupun dari aspek komunikasi sumber daya manusianya, proses juga sebagai ukuran terhadap bagaimana penilaian lembaga bermutu pada standart nasional pendidikan (SNP). Berbeda dengan output, output sendiri mengarah pada bagaimana lembaga menghasilkan lulusan-lulusan yang kompten dan bermutu. Output juga dapat dipahami sebagai hasil dari kinerja lembaga pendidikan dari yang menghasilkan sebuah capaian ditengah-tengah lembaga pendidikan itu sendiri.

Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan mutu pendidikan di sekolah. Sehingga, dengan tata kelola keuangan sekolah yang baik, diharapkan manajemen lainnya juga baik, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi (Fadhila, 2021). Hubungan keduanya yaitu manajemen pembiayaan sebagai penopang dalam meraih mutu yaitu dengan penggunaan biaya dalam mencapai target mutu. Pengelolaan biaya pendidikan dapat dikelola melalui cara-cara manajemen yaitu dengan menerapkan konsep-konsep manajemen seperti halnya perencanaan keuangan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan pada pembiyaan pendidikan. Manajemen keuangan sangat dibutuhkan guna penyaluran keuangan pada sasaran-sasaran pendidikan yang memang betul-betul menunjang terhadap kebutuhan lembaga dalam mencapai standar mutu.

Pembiayaan pendidikan dapat dialokasikan pada hal-hal yang sederhana seperti perbaikan terhadap proses belajar, perbaikan yang dimaksud seperti halnya menyediakan segala kebutuhan belajar mengajar, mulai dari pengadaan bahan ajar, lingkungan yang nyaman, penetapan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa, media yang cocok dengan pembelajaran, bimbingan dan didikan yang baik terhadap siswa, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis demikian agar

lembaga dapat meningkatkan kompetensi dalam memahami pembelajaran. Dari sisi yang berbeda, pembiayaan pendidikan juga dapat dialokasikan terhadap pembiayaan guru dengan cara mengikuti pelatihan ataupun seminar upaya membentuk guru profesional, karena salah satu capaian mutu pendidikan juga ditinjau dari kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, maka pembiayaan pendidikan dapat diarahkan pada capaian kompetensi pendidik sebagaimana yang telah diatur dalam standar mutu pendidikan.

Dalam hal ini manajemen sebagai salah satu bidang keilmuan dalam pengelolaan pendidikan dapat pula dijadikan sebagai acuan konsep pembiayaan pendidikan, yaitu mengenai bagaimana mengelola keuangan lembaga pendidikan yang baik. Konsep manajemen pembiayaan/keuangan dalam lembaga pendidikan setidaknya dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai konsep dasar manajemen.

- a. Perencanaan keuangan (budgeting): pada tahap ini hendaknya menganalisis lebih awal apa saja kebutuhan lembaga pendidikan, apa saja yang harus dikembangkan dan apa saja yang harus diadakan dengan dibentuk pembukuan penganggaran.
- b. Pelaksanaan (akunting): pada tahap ini kepala sekolah dan guru kolaborasi dan menjalin kerja sama terhadap apa yang telah direncanakan dalam meningkatkan kualitas lembaga dengan menggunakan biaya pendidikan atas dasar ketentuan dan kesepakatan.
- c. Pengawasan (monitoring): Segala bentuk pembiayaan pendidikan dikontrol dengan tujuan agar pendanaan lembaga pendidikan sesuai dengan prosedur yang ada dan tentunya sebagai barang bukti bahwa pendanaan lembaga digunakan untuk kepentingan warga sekolah.
- d. Evaluasi (auditing): tahap ini yaitu laporan penggunaan keuangan lembaga pendidikan Islam, evaluasi yang dimaksud yaitu bahwa keuangan yang digunakan diukur berdasarkan pengukuran perekonomian yang meliputi (akuntabilitas, transparan, konsistensi dan efektifitas).

Dengan menggunakan konsep manajemen keuangan maka mudah bagi lembaga pendidikan untuk mencapai standar mutu. Manajemen biaya pendidikan berfungsi sebagai suatu usaha bagi penyelenggara pendidikan dalam meningkatkan mutu. Mutu pada dasarnya tidak akan datang dengan sendirinya melainkan harus ada usaha dan kerja sama dari pihak pendidikan, dan salah satunya yaitu dengan mengelola pendapatan lembaga kearah perbaikan-perbaikan dalam pendidikan. Pembiayaan yang tertuju pada perbaikan dalam pendidikan akan mengantarkan pada standarisasi mutu, perbaikan yang dimaksud tidak hanya pada fasilitas belajar melainkan terhadap semua sektor termasuk sumber daya manusianya. Lembaga akan melahirkan perubahan budaya pendidikan kearah yang lebih baik, yaitu dengan upaya pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam.

Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran (Syaifullah, 2021). Lembaga harus membuat dan menganalisis program berdasarkan pembiayaannya, dalam hal ini dapat dilakukan dengan memprediksi pengeluarannya dengan targeting pendapatan lembaga dalam satu tahun. Targeting kelembagaan dimaksudkan untuk mengetahui apa yang mau dijalankan serta berapa pembiayaannya. Maka dengan begitu lembaga Pendidikan Islam akan mendapatai

hasil yang efisien dari pendapatan dan pembelanjaan lembaga pendidikan Islam, dan tentunya pengelolaan anggaran yang dikeluarkan dapat maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan adalah cara-cara yang dilakukan supaya proses pemasukan dan pengeluaran lembaga pendidikan dapat terorganisir dan efektif. Manajemen keuangan berkontribusi terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam yaitu dengan menerapkan konsep-konsep manajemen terhadap sasaran pembiayaan pada perbaikan-perbaikan mutu lembaga pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrita, R., Demina, & Zulmuqim. (2022). Manajemen Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman*, 11(2), 159–166.
- Basyit, A. (2018). Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan Islam. *KORDINAT*, 17(1), 187–210.
- Fadhila, H. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. 1–9.
- Fitrah, M. (2017). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 31–42. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90>
- Karimah, F. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam dalam Peningkatan Mutu Layanan di MIS Tahfidz Ash-Habul Kahfi Beran Jawa Timur. *Jurnal Seumubeuet: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 191–207.
- Kuntoro, T. A. (2019). Manajemen Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 84–97. <https://doi.org/10.30821/hijri.viii.2.13072>
- Mesiono, & Roslaeni. (2021). Model-Model Pembiayaan Pendidikan (Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Institusi Pendidikan). *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.51672/jbpi.v2i1.10>
- Mesiono, Suswanto, Lubis, R. R., & Haidir. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 13(1), 119–134. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.6244>
- Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *Jurnal-At-Ta'dib*, 8(2), 223–239. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v2i2.16466>
- Mustari, M. (2014). *Manajemen Pendidikan*. Rajawali Press.
- Nasution, F., Anggraini, L. Y., & Putri, K. (2022). Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa, dan Jenis-Jenis Sekolah Luar Biasa. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(3), 422–427.
- Nurkamiden, U. D., & Anwar, H. (2023). Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 53–64. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.viii.3384>
- Nursobah, A. (2022). Manajemen Pembiayaan pada Lembaga Pendidikan Islam. *AN-NAHDLIYYAH: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2013.
- Putri, U. H. (2019). Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan.
- Rachman, G. G., & Yuningsih, K. (2020). Pengaruh Biaya Distribusi Dan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan (Studi Pada Sari Intan Manunggal Knitting Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 151–175.
- Ramdani, M. (2023). Penerapan Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 15–25.
- Roji, M. (2020). Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam. Umsida Press.
- Solehan. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 98–105. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3046>
- Supadi. (2021). Manajemen Mutu Pendidikan. UNJ Press.
- Syaifullah, M. (2021). Manajemen Keuangan Pendidikan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 4(23), 11–17.
- Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 219–246. <https://doi.org/10.19105/tadris.viii2.1170>
- Wahyudin, U. R. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Pendekatan, Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas. Deepublish.
- Zed, M. (2023). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Zulfa, U. (2012). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat: Analisis School Levy. *Jurnal Pendidikan Islam*, 17(2), 239–254.